

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA/
KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA
TAHUN 2017-2019**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

ALFIAN HUSNAIN ARDIANSYAH

B200217555

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KOTA/ KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH
PADA TAHUN 2017-2019**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

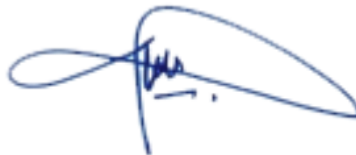
ALFIAN HUSNAIN ARDIANSYAH

B200217555

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, ending in a horizontal line.

(Drs. Atwal Arifin, M. Si)

NIK. 523

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KOTA/ KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH
PADA TAHUN 2017-2019**

OLEH

ALFIAN HUSNAIN ARDIANSYAH

B200217555

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 11 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, M. Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan A., S.E., M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Yuli T.C., M.M., Ak., C.A
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan,

Prof. Durianto Agus Setyawan, S.E., M.Si.
NIR/NIDN: 829/0616087401

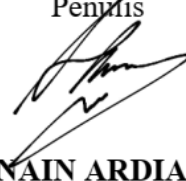
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2023

Penulis



ALFLAN HUSNAIN ARDIANSYAH

B200217555

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH
PADA TAHUN 2017-2019**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 hingga 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 hingga 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal.

Abstract

This research aims to test whether Regional Original Income, General Allocation Fund and Special Allocation Fund affect Capital Expenditure in Regency / City Government in Central Java Province in 2017 to 2019. The population in this study is all regencies / cities in central Java province. The data used is secondary data taken from the District / City Budget Realization Report in Central Java Province in 2017 to 2019. The data analysis technique used in this study is Multiple Linear Analysis. Based on the results of tests conducted showed that The Original Regional Income has an effect on Capital Expenditure, the General Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure and the Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure.

Keywords: local original income, general allocation fund, special allocation fund and capital expenditure.

1. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008:100). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, “APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Fahmi dan Hariani (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian assosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Tehnik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara bersama dan parsial terhadap Belanja Modal.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk dalam kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Dengan adanya otonomi, maka daerah diharapkan menjadi mandiri di dalam pengelolaan keuangan yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah sehingga daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan sesuai tujuan pelaksanaan otonomi untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi

dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadiah dan Jacobus (2019) dengan judul PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh pada Belanja modal.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Otonomi daerah pada hakekatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana public dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan 23 kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. Badan Pusat Statistik (2009) menyatakan bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2008 terhimpun sekitar 4,5 triliun rupiah, naik sekitar 0,35 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara umum berpotensi untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah lain dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kabupaten dan kota.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Nadiah dan Jacobus (2019) yang berjudul PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya terdapat pada, variabel, dan tahun penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019”

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal yang mempunyai sifat pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode sensus yang merupakan metode dengan mengambil populasi.

2.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2017 hingga 2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2017 hingga 2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik ini karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan atau Kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

- a. Melaporkan data mengenai PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal.

- b. Melaporkan data mengenai PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2019.

2.3 Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2019.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017-2019.

2.5 Teknik Analisis Data

2.5.1 Analisis Deskriptif

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam analisis deskriptif ini akan menjelaskan tentang analisis deskriptif masing-masing variable dan analisis deskriptif statistik.

2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian Normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas, multikorelasi dapat dilihat dari nilai VIF (*variance-inflating factor*). Jika $VIF < 10$, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono dan Julianita, 2011:70)

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*disturbance term-ed*) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi. Menurut Fadrul dan Eka Pariani (2018) berdasarkan hasil Durbin-Watson jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 maka tidak terdapat Autokorelasi dalam model penelitian ini.

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians table tidak sama menunjukkan semua pengamat/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan kata lain tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan melihat *spearman test*.

2.5.3 Uji Model (F)

Uji Simultan dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, dengan tingkat keyakinan 95%. Adapun kriteria keputusan yang diambil sebagai berikut: Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka H_a diterima dan H_o Ditolak, Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka H_a ditolak dan H_o diterima.

2.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan variabel terikat (Belanja Modal). Pengaruh antara keduanya akan diformulasikan kedalam persamaan (Sugiyono, 2012).

Persamaan Regresi tersebut adalah:

$$\text{Dimana : } BM = K + PAD + DAU + DAK + e \quad (1)$$

BM = Belanja Modal

K = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

$b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi masing-masing Variabel

e = Error term

2.5.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu, jika nilai *sig.* < 0,05 maka, hipotesis diterima.

2.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nilai $t_{hitung} 10.539 > t_{tabel} 1.983$, maka H_1 diterima sehingga terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah Dwi Retno dan Jacobus Widiatmo (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdapat pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan jika pendapatan asli daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal akan mengalami peningkatan.

3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nilai $t_{hitung} 1.936 > t_{tabel} 1.983$, maka H_2 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), yang menyatakan bahwa parameter variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain bahwa anggaran belanja umum tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap anggaran belanja modal daerah.

3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai $t_{hitung} 0.613 < t_{tabel} 1.660$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak atau tidak terjadi pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), yang menyatakan bahwa parameter variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain bahwa anggaran dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. H_1 diterima , sehingga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.481 dan nilai $t_{hitung} 10.539 > t_{tabel} 1.983$ pada tingkat signifikansi 0.05. Sehingga H_1 dinyatakan diterima.
- b. H_2 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0.163 dan nilai $t_{hitung} 1.936 < t_{tabel} 1.983$ pada tingkat signifikansi 0.05. Sehingga H_2 dinyatakan diterima.

- c. H_3 ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.111 dan nilai $t_{hitung} 0.613 < t_{tabel} 1.983$ pada tingkat signifikansi 0.05. Sehingga H_3 dinyatakan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Syukuri, M., Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan” dalam JEMMA : Jurnal Of Economic, Management and Accounting Volume 2 Nomor 2. Sulawesi Selatan. *E-jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma*.
- Susanti, S., Fahlevi, H. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). Volume 1 Nomor 1 Halaman 183-191. Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*
- Fahmi, M., Hairani. 2019. Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Vol. 16 No. 1. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Retno, N, D., Widiatmoko, J. 2019. “PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017)” dalam Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 8, No. 1, Hal: 24-36. Semarang. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, Indonesia*.
- Pariani, E., Fadrul. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau” dalam BILANCIA Vol. 2 No. 2. Pekanbaru. *Program Studi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018, Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019, Laporan Realisasi Anggaran. www.djpk.depkeu.go.id.

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

UU RI. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*

UU RI. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*